



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I  
2018

**Penyusun:**

Penanggung Jawab: Tauhid II Ketua Tim: M. Budi Dharmanto II  
Editor: Aan Rudiawan, Surya Palilati, Firdaus Dwi Kuncoro II  
Anggota: Zannah Nurcahyati, Budi Santoso, I Nyoman Sudarma

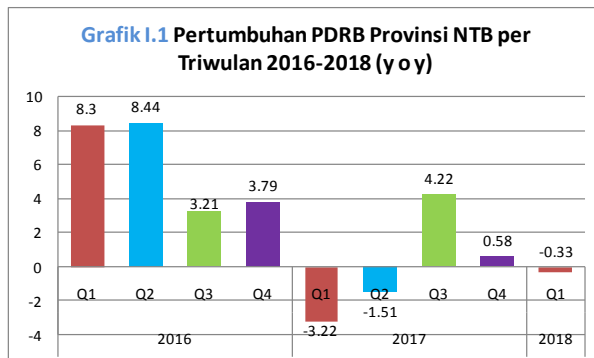
**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN  
Provinsi NTB**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
<b>I. Perkembangan Dan Analisis Ekonomi Regional.....</b>	<b>1</b>
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
B. Inflasi.....	2
C. Indikator Kesejahteraan.....	2
C.1. Tingkat Kemiskinan.....	2
C.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	3
C.3. Indeks Pembangunan Manusia.....	3
<b>II. Perkembangan Dan Analisis Pelaksanaan APBN.....</b>	<b>5</b>
A. Pendapatan Negara.....	5
A.1. Penerimaan Perpajakan.....	5
A.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	7
A.3. Penerimaan Hibah.....	8
B. Belanja Negara.....	8
B.1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	8
B.2. Belanja Pemerintah Pusat.....	9
B.3. Belanja Bagian Anggaran BUN.....	10
C. Prognosis Realisasi APBN Sampai Dengan Triwulan II tahun 2018.....	11
<b>III. Perkembangan Dan Analisis Pelaksanaan APBD.....</b>	<b>13</b>
A. Pendapatan Daerah.....	14
A.1. Pendapatan Asli Daerah.....	14
A.2. Pendapatan Transfer.....	15
A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	16
B. Belanja Daerah.....	16
C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2018.....	16
<b>IV. Perkembangan Dan Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD).....</b>	<b>18</b>
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	18
B. Pendapatan Konsolidasian.....	18
B.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan.....	18
B.2. Analisis Perubahan.....	19
B.3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian.....	20
C. Belanja Konsolidasian.....	20
C.1. Analisis Proporsi dan Perbandingan.....	20
C.2. Analisis Perubahan.....	21
C.3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional.....	21
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
<b>V. Berita/Isu Fiskal Regional Terpilih.....</b>	<b>24</b>
A. Pariwisata NTB Yang Terus Mendunia.....	24
B. Menkeu Minta Mandalika Bersiap Sambut <i>Annual Meeting</i> IMF.....	25

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



(Sumber: BPS Prov. NTB, diolah)

PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2018 mencapai Rp29,70 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp21,84 triliun. Kontribusi PDRB NTB terhadap pembentukan PDB (Rp3.505,3 triliun) sebesar 0,85

persen. Pertumbuhan perekonomian Provinsi NTB triwulan I 2018 mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen terhadap triwulan I 2017 (yoy). Melambatnya kinerja perekonomian NTB pada triwulan I 2018 ini tidak dapat dipisahkan dari turunnya ekspor luar negeri, dimana konsentrat tembaga sebagai penyumbang terbesar ekspor luar negeri Provinsi NTB, tercatat mengalami kontraksi hingga mencapai 26,48 persen. Dibandingkan dengan triwulan IV 2017, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan I 2018 mengalami kontraksi hingga 6,10 persen (*q to q*). Sedangkan, jika dihitung tanpa pertambahan bijih logam, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2018 (yoy) tumbuh sebesar 4,34 persen. Capaian pertumbuhan tersebut berada di bawah rata-rata capaian pertumbuhan triwulan I dalam empat tahun terakhir (2014-2017) yang mencapai 5,38 persen, dan jauh di bawah target pertumbuhan tahun 2018 yang ditetapkan pada kisaran 6,25 - 6,50 persen.

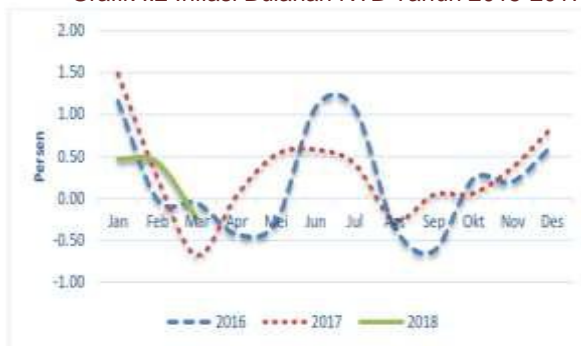
Pertumbuhan Ekonomi NTB triwulan I 2018, yang tercermin pada PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp19,55 triliun (65,83 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp11,10 triliun (37,37 persen) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp4,69 triliun (15,80 persen). Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, struktur perekonomian NTB pada triwulan I 2018 didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (23,43 persen) diikuti oleh kategori pertambangan dan penggalian (14,58 persen), kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi dan sepeda motor (14,27 persen). Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peranan dominan dalam pembentukan PDRB, pada triwulan I 2018, mengalami kontraksi sebesar 0,24 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi

NTB untuk mengoptimalkan lapangan usaha lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti sektor pariwisata dan industri pengolahan.

## B. Inflasi

Laju inflasi NTB selama periode triwulan I 2018 lebih terkendali dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 dan tahun 2017. Inflasi triwulan I 2018 sebesar 0,66 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (1,05 persen). Inflasi NTB selama triwulan I 2018 masih berada di bawah asumsi

Grafik I.2 Inflasi Bulanan NTB Tahun 2015-2017



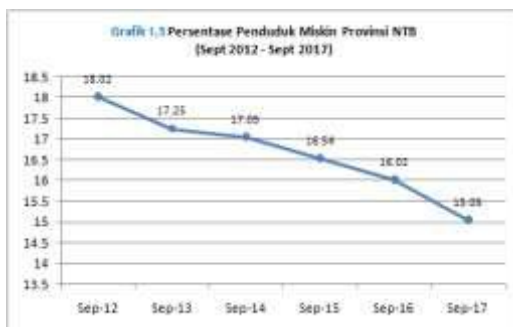
makro ekonomi Provinsi NTB tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 3 - 5 persen. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan TPID Provinsi NTB dalam menjaga kestabilan harga di daerah, terutama pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi.

Pada bulan Maret 2018, NTB mengalami deflasi sebesar 0,24 persen, dan berada di bawah angka nasional yang tercatat mengalami inflasi 0,20 persen. Hal ini terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan deflasi pada Kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan masing-masing sebesar 1,62 persen dan 0,06 persen.

Untuk terus menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan langkah-langkah antisipatif dalam menekan kenaikan harga-harga pangan, terutama menjelang hari raya idul fitri. Selain itu pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan peran BUMD sebagai penyangga ketahanan pangan.

## C. Indikator Kesejahteraan

### 1. Tingkat Kemiskinan

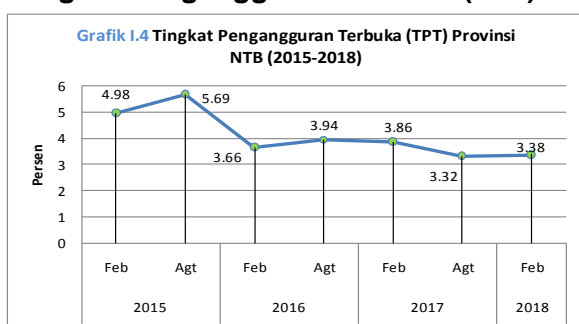


(Sumber: BPS Prov. NTB, diolah)

Persentase penduduk miskin Provinsi NTB dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik I.3. Persentase penduduk miskin Provinsi NTB pada September 2012 sebesar 18,02 persen (840,11 ribu orang), turun hingga mencapai angka 15,05 persen (748,12 ribu orang) pada September 2017. Jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September tersebut berkurang 45,66 ribu

orang dibandingkan periode bulan Maret 2017. Penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 – September 2017 merupakan yang tertinggi sejak 2012, pada saat pertama kali dilakukan penghitungan angka kemiskinan dua kali dalam setahun. Pemerintah terus melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya untuk mencapai masyarakat NTB yang lebih sejahtera.

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

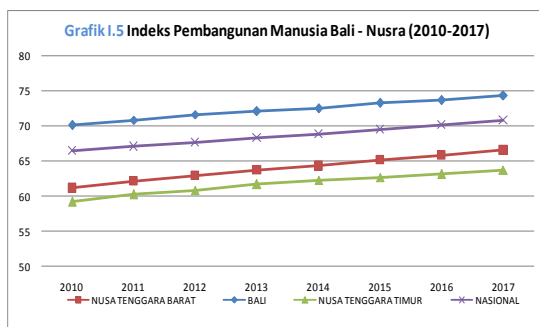


(Sumber: BPS Prov. NTB, diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTB pada Februari 2018 mencapai 3,38 persen, lebih rendah dibandingkan dengan TPT pada Februari 2017 yaitu sebesar 3,86 persen. Tingkat pengangguran tersebut

menempatkan NTB pada posisi ke-10 dari 34 provinsi di Indonesia sebagai provinsi dengan angka pengangguran terendah. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,13 persen. Capaian tersebut disebabkan peningkatan persentase penduduk bekerja pada sektor Jasa Pendidikan (0,85 poin). Pada Februari 2018, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 23,43 persen, disusul Sektor Pertambangan dan Penggalian 14,58 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,27 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam melihat potensi lokal untuk dijadikan sebagai penggerak perekonomian NTB.

## 3. Indeks Pembangunan Manusia



(Sumber: BPS, diolah)

Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan, dimana pada tahun 2010 sebesar 61,16 dan di tahun 2017 sebesar

66,58 atau tumbuh sebesar 1,17 persen. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 0,90 dan merupakan laju pertumbuhan terbaik ke-3 se-Indonesia. Rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi NTB per tahun sebesar 1,22 persen (2010-2017).

Keberhasilan tersebut, merupakan hasil dari kinerja Pemerintah Provinsi NTB yang mengembangkan berbagai inovasi untuk membawa NTB mampu bersaing dengan daerah lain. Di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi alat ukur dalam menghitung IPM, telah digerakkan program 3 A, yaitu Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), Angka Buta Aksara Nol (ABSANO), dan Angka Drop Out Nol (ADONO), dan merupakan daerah pertama di Indonesia yang mengalokasikan 20 persen dana APBD untuk pendidikan. Melalui anggaran tersebut, antara lain melalui alokasi DAK Fisik digunakan untuk pembenahan dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

Meskipun tren IPM NTB terus mengalami kenaikan, namun capaian tersebut masih menempatkan Provinsi NTB masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (peringkat ke-29 dari 34 provinsi). Capaian IPM tertinggi secara nasional adalah Provinsi DKI sebesar 80,06 dan capaian terendah adalah Provinsi Papua sebesar 59,09.

Capaian IPM Provinsi NTB berdasarkan daerah, yang tertinggi adalah Kota Mataram sebesar 77,84 dan terendah tercatat di Kabupaten Lombok Utara sebesar 63,04. Faktor penyebab masih rendahnya IPM NTB adalah Rata-rata Lama Sekolah (Usia 25 tahun ke atas). RLS NTB tahun 2017 sebesar 6,9 (kelas VII), terpaut cukup jauh dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,10 (kelas IX).

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi NTB  
s.d. Triwulan I 2017 dan 2018 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
A. Pendapatan dan Hibah	3.467,42	714,32	20,60	3.377,53	779,74	23,09
I. Pendapatan Dalam Negeri	3.467,42	714,32	20,60	3.377,53	779,74	23,09
1. Pendapatan Perpajakan	3.216	588,79	18,31	3.089	726,57	23,52
2. Pendapatan Mengacu Bukan Pajak	251,42	125,52	49,93	308,53	53,17	17,23
II. Hibah						
B. Belanja Negara	24.038,12	4.529,30	18,84	25.038,48	5.029,97	20,07
I. Belanja Pemerintah Pusat	8.882,17	872,14	9,81	7.187,36	925,36	12,87
1. Belanja Pegawai	2.792,19	494,54	17,71	2.788,38	529,88	19,01
2. Belanja Barang	3.203,33	358,26	11,19	3.199,72	238,36	7,45
3. Belanja Modal	1.912,78	47,32	2,47	1.999,82	169,71	8,49
4. Belanja Sosial	36,15	8,81	2,44	77,21	1,28	1,66
5. Belanja Lain-lain						
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	16.856,05	3.657,16	21,70	17.851,12	4.104,79	22,99
A. Transfer ke Daerah	15.852,67	3.461,88	21,84	16.331,87	4.182,79	25,61
a. Dana Perimbangan	14.889,79	3.359,58	22,57	15.852,81	3.958,46	24,97
1. DPM	1.134,48	219,17	19,31	3.113,28	481,28	15,46
2. DMI	8.588,17	2.852,88	33,21	8.584,95	2.839,58	33,07
3. DMI Fiskal	1.959,54	-	0	2.884,35	-	0
3. DMI Non Fiskal	2.488,18	289,25	11,62	2.389,65	629,36	26,36
a. Dana Insentif Daerah		388,58	32,92	254,35	152,33	60,30
II. Dana Desa	983,18	195,16	19,85	1.004,61	-	0
C. Surplus/Defisit Anggaran	-2057,70	-334,98	16,52	-2.360,95	-428,23	18,14

(Sumber: OMSPAN & SIMTRADA, diolah)  
tahun sebelumnya pada periode yang sama.

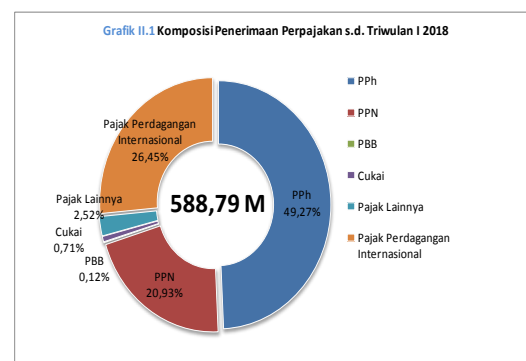
### A. Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah NTB sampai dengan triwulan I 2018 telah mencapai 20,6 persen (Rp714,32 miliar) dari target yang ditetapkan Tahun 2018. Penerimaan perpajakan masih menjadi unsur yang dominan dalam perolehan Pendapatan Negara. Hingga triwulan I 2018, penerimaan perpajakan mencapai 18,31 persen (Rp588,79miliar). Sedangkan penerimaan dari non perpajakan atau PNBP mencapai 49,93 persen (Rp125,52 miliar) dari target yang telah ditetapkan.

#### 1. Penerimaan Perpajakan

Pendapatan dari penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan I 2018 mengalami penurunan sebesar 18,96 persen (Rp137,78 miliar) dari perolehan tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp726,57 miliar. Penyumbang terbesar dari penurunan tersebut berasal dari penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang turun hingga 36,55 persen. Komposisi penerimaan perpajakan sebagai berikut:

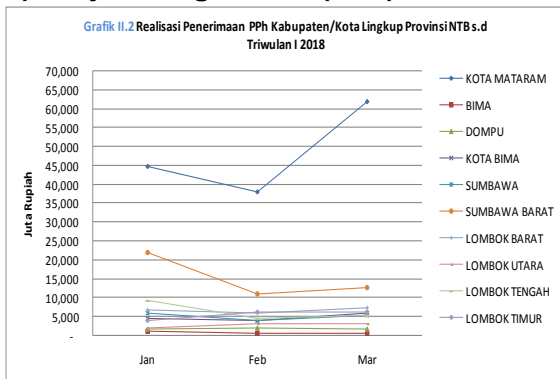
Realisasi Belanja Negara sampai dengan triwulan I 2018 di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 18,88 persen (Rp4,54 triliun) atau 1,1persen lebih tinggi dari capaian triwulan I 2017. Adapun realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp714,32miliar atau menurun sebesar 8,39 persen bila dibandingkan dengan realisasi



(Sumber: OMSPAN, diolah)



**a) Pajak Penghasilan (PPh)**

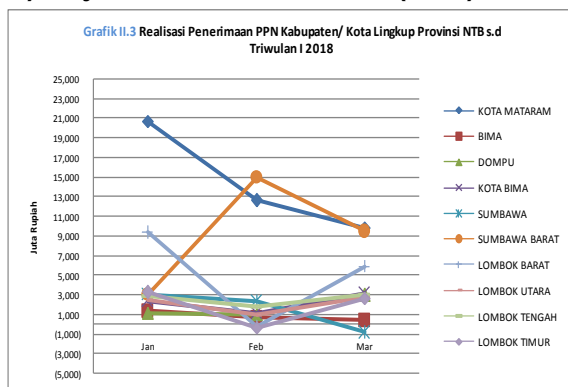


(Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Bali-Nusra diolah)

Penerimaan Pajak Penghasilan dari berbagai Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat bervariasi. Penerimaan Pajak Penghasilan tertinggi berasal dari Kota Mataram yang mencapai 49,48 persen (Rp144,68 miliar) dari total penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi merupakan pusat aktivitas perekonomian NTB.

Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terbesar perolehan Pajak Dalam Negeri. Secara akumulasi perolehan Pajak Penghasilan sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp290,12 miliar, lebih rendah 19,76 persen dari capaian triwulan I 2017.

**b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**



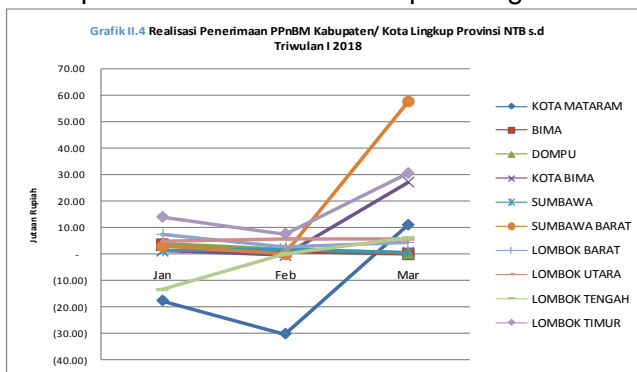
(Sumber: OMSPAN, Kanwil DJP Bali Nusra, diolah)

mempertegas eksistensinya sebagai pusat perniagaan di wilayah NTB.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp123,04 miliar atau meningkat 16,38 persen dari periode yang sama tahun yang lalu. Penerimaan tertinggi berasal dari Kota Mataram, yang mencapai 34,99% semakin

**c) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM)**

Total penerimaan PPnBM sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp217,34



(Sumber: Kanwil DJP Bali Nusra, diolah)

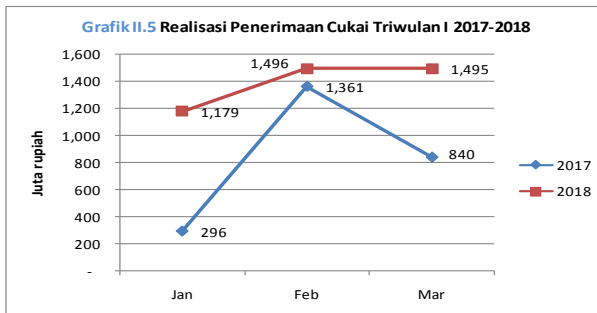
Kabupaten/Kota dengan perolehan PPnBM terbesar yaitu Kabupaten

juta. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar Rp392,34 juta atau 64,35 persen dari tahun 2017 pada periode yang sama. Dari 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB, terdapat 3



Sumbawa Barat sebesar Rp60,48 juta, Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp52,04 juta, dan Kota Bima sebesar Rp27,92 juta.

#### d) Penerimaan Cukai



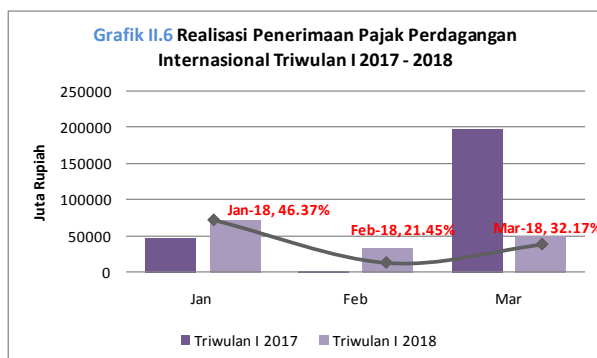
(Sumber: OMSPAN, diolah)

Mayoritas penerimaan berasal dari cukai hasil tembakau (tembakau iris) yang merupakan potensi utama penerimaan Cukai di Provinsi NTB.

Realisasi penerimaan Cukai sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp4,17 miliar.

Capaian tersebut 66,93 persen lebih tinggi dari penerimaan pada periode yang sama tahun 2017.

#### e) Pajak Perdagangan Internasional

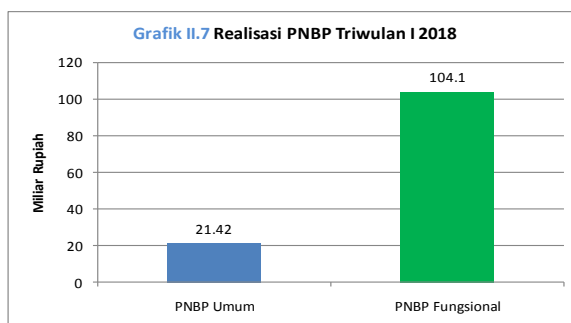


(Sumber: OMSPAN, diolah)

Penerimaan yang bersumber dari Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu 26,45 persen dari total Pendapatan Perpajakan di Wilayah NTB. Pendapatan tersebut berasal dari Bea

Masuk dan Bea Keluar. Realisasi sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp155,72 miliar, lebih rendah 36,55 persen dari penerimaan triwulan I 2017.

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



(Sumber: OMSPAN, diolah)

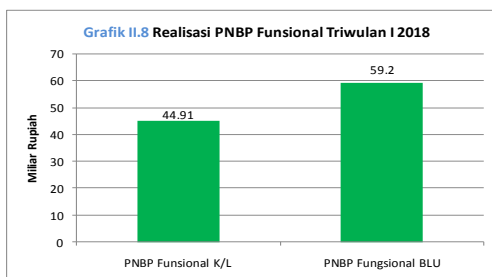
penerimaan PNBP sampai dengan triwulan I 2018 berasal dari penerimaan PNBP umum sebesar Rp21,42 miliar dan penerimaan PNBP Fungsional sebesar Rp104,10 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp125,52 miliar meningkat 136,05 persen dari penerimaan PNBP triwulan I 2017. Berdasarkan jenis PNBP,

### a) Penerimaan PNBP Umum

Penerimaan PNBP Umum mencapai Rp21,42 miliar. Sebagian besar Penerimaan tersebut merupakan Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp20,494 miliar.

### b) Penerimaan PNBP Fungsional



(Sumber: OMSPAN, diolah)

PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp59,20 miliar. PNBP Fungsional dari BLU berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Dari sektor pendidikan, Universitas Mataram menyumbang sebesar Rp55,81 miliar. Sedangkan dari sektor kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara berkontribusi sebesar Rp3,38 miliar.

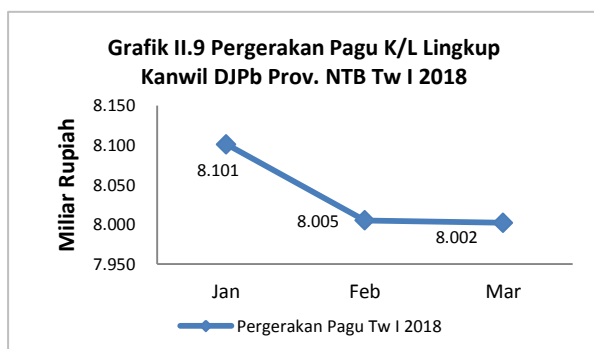
Penerimaan PNBP Fungsional sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp104,10 miliar. Pendapatan PNBP Fungsional merupakan akumulasi dari PNBP yang dikelola Kementerian/ Lembaga sebesar Rp44,91 miliar, dan

## 3. Penerimaan Hibah

Sampai dengan triwulan I 2018, tidak terdapat realisasi penerimaan hibah di wilayah Provinsi NTB.

## B. Belanja Negara

Berdasarkan grafik di bawah, terjadi pergerakan pengurangan pagu belanja



(Sumber: OMSPAN, diolah)

Kementerian Negara/ Lembaga lingkup Provinsi NTB. Pagu Belanja di Bulan Januari sebesar Rp8,101 triliun, berkurang menjadi Rp8,002 triliun di Bulan Maret 2018.

Adapun belanja negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dibagi menjadi tiga *channel* yaitu:

### 1. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Prov. NTB

(dalam ribu rupiah)

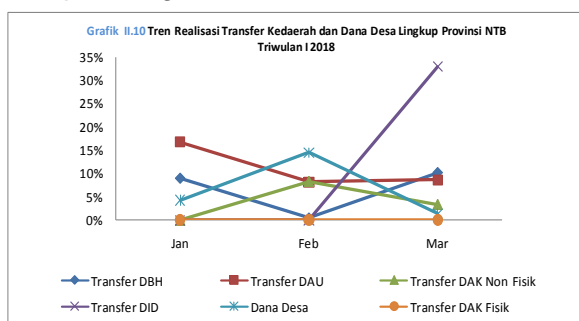
DANA TRANSFER	ALOKASI	REALISASI	SISA	% REALISASI
DBH	1.113.482.669	219.179.936	894.302.733	19,68%
DAU	8.564.172.174	2.853.086.731	5.711.085.443	33,31%
DAK FISIK	1.931.542.346	-	1.931.542.346	0%
DID	305.250.000	100.500.000	204.750.000	32,92%
DAK NON FISIK	2.460.103.504	288.255.819	2.171.847.685	11,72%
DANA DESA	983.185.878	196.161.144	787.024.734	20%
<b>TOTAL</b>	<b>15.357.736.571</b>	<b>3.657.183.630</b>	<b>11.700.552.941</b>	<b>23,81%</b>

(Sumber: SIMTRADA, diolah)

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah se- Provinsi NTB sebesar Rp15,36 triliun. Dibandingkan dengan alokasi pagu

TKDD tahun 2017, sampai dengan triwulan I 2018 alokasi pagu TKDD mengalami penurunan sebesar Rp1,82 triliun atau sebesar 10,62 persen. Pengurangan alokasi terjadi pada transfer DBH dan alokasi DAK Fisik. Namun, terdapat penambahan alokasi pada transfer DAU, DID, DAK non Fisik dan Dana Desa.

Sampai dengan triwulan I 2018, realisasi Dana Transfer dan Dana Desa lingkup



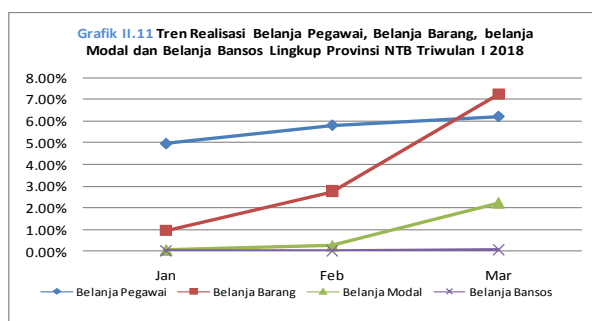
(Sumber: SIMTRADA & OMSPAN, diolah)

Provinsi NTB mencapai Rp3,66 triliun atau 23.81 persen dari total alokasi pagu Dana Transfer dan Dana Desa. Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp196,16 miliar. Sampai dengan triwulan I 2018 realisasi Transfer

DAK Fisik masih belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dan kesiapan sistem.

## 2. Belanja Pemerintah Pusat

Sampai dengan triwulan I 2018, realisasi Belanja Pemerintah Pusat lingkup Provinsi NTB sebesar 10,90 persen (Rp872,14 miliar). Capaian tersebut 1,63



(Sumber: OMSPAN, diolah)

Maret 2018 sebesar 0.07% dari total pagu Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18,15 miliar.

Selain itu, pengelolaan BLU di Provinsi NTB terdiri dari 2 jenis layanan, yaitu

Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat di Provinsi NTB Tahun 2018

(dalam miliar rupiah)

No	Jenis Layanan	Satker BLU	Pagu RM	Pagu PNBP	Jumlah Pagu	Jumlah Pendapatan s.d Tw I 2018
1	Pendidikan	Universitas Mataram	197,73	160,50	358,23	55,81
2	Pendidikan	UIN Mataram	77,05	23,15	100,20	-
3	kesehatan	Rumkit Bhayangkara Mataram	6,05	18,57	24,62	3,39
Total			280,82	202,23	483,05	59,20

(Sumber: OMSPAN, diolah)

persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 12,53 persen.

Pada periode triwulan I 2018, realisasi belanja bantuan sosial baru terealisasikan pada bulan

kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan. Dari sektor pendidikan jumlah dana yang dikelola sebesar Rp458,43 miliar, sedangkan dari sektor kesehatan jumlah dana yang dikelola sebesar Rp35,62 miliar.

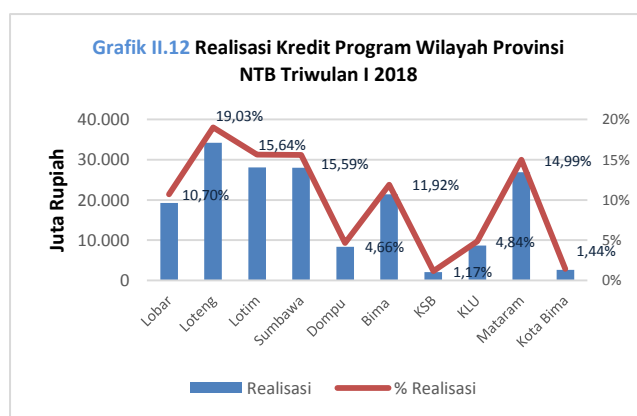
Pendapatan BLU Universitas Mataram sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp55,81 miliar. Sementara itu, Rumah Sakit Bhayangkara baru ditetapkan sebagai satker BLU pada 2017 dengan realisasi pendapatan BLU sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp3,38 miliar.

### 3. Belanja Bagian Anggaran BUN

Belanja BA BUN meliputi belanja berbagai subsidi, investasi, pinjaman, penjaminan risiko, yang dialokasikan dan dibayarkan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

#### a. Kredit Program

Realisasi penyaluran Kredit Program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp179,67 miliar. Menurut wilayahnya, daerah yang



(Sumber: SIKP, diolah)

adalah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp34,19 miliar atau 19,03 persen dari total realisasi. Sedangkan, daerah dengan realisasi penyaluran terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp2,11 miliar atau 1,17 persen dari total realisasi. Berdasarkan lembaga penyalur, sampai dengan triwulan I 2018, Bank BRI telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp78,07 miliar atau 43,45 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi NTB. Sedangkan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) di wilayah Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp5,70 miliar kepada 815 debitur.

#### b. Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman

Tabel II.4 Profil Penerusan Pinjaman Lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB

No	Nomor SLA	Nama SLA	Penerima SLA	Jumlah SLA Rp.	Tingkat Bunga
1	RDA-206/DP3/1994	Proyek Air Bersih	PDAM Kab.Loteng	13.961.473.700,77	11,5%
2	SLA-1084/DP3/1998	Eastern Island UDP	PDAM Kab.Bima	1.472.871.293,32	11,5%
3	SLA-1088/DP3/1998	Eastern Island UDP	PDAM Kab.Lotim	1.723.243.779,39	11,5%
4	SLA-806/DP3/1995	Eastern Island UDP	PDAM Kab.Lobar	4.380.945.872,00	11,5%
5	SLA-1103/DP3/1999	Eastern Island UDP	PDAM Kab. Sumbawa	1.543.455.137,78	11,5%
Jumlah				23.081.989.783,26	

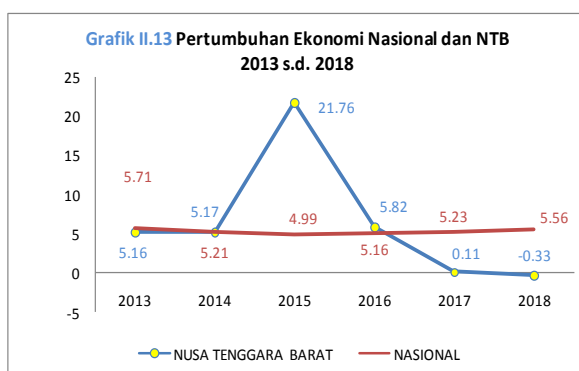
Sumber: SLIM (data diolah)

Salah satu manajemen investasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah penerusan pinjaman pemerintah pusat (*Subsidiary Loan*

*Agreement*) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terdapat 5 (lima) PDAM di wilayah Provinsi NTB yang menerima penerusan pinjaman dengan nilai sebesar Rp23,08 miliar.

Menteri Keuangan telah menyetujui penyelesaian piutang negara pada Koperasi Angkutan Penyeberangan dan Pelayaran (KAPP) Nusa Wangi Provinsi NTB sebesar Rp1,30 miliar (skema RDI) melalui mekanisme penjadwalan kembali selama 9 tahun. Sampai dengan 31Maret 2018, sisa hak tagih pemerintah adalah sebesar Rp1,158 miliar.

### C. Prognosis Realisasi APBN Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018



(Sumber: BPS, diolah)

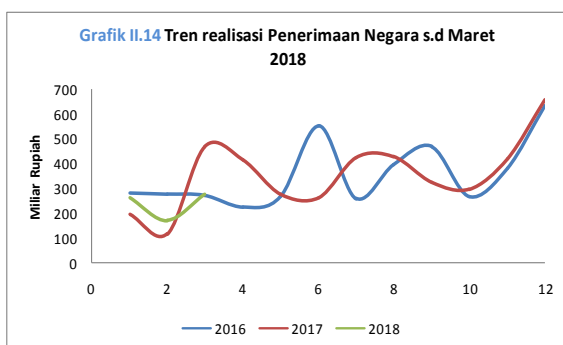
Fundamental ekonomi nasional pada triwulan I 2018 tetap kuat. Hal ini tercermin dari antara lain tingkat inflasi yang terjaga sesuai target inflasi 2018 sebesar  $3,5 \pm 1$  persen, kondisi APBN yang terus terjaga dengan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer APBN yang lebih kecil dibanding triwulan I

2017, momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dengan konsumsi, investasi, dan ekspor yang masih terus terjaga.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap terjaga sesuai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen. Selain itu kinerja ekonomi optimis akan lebih positif, didorong bulan Ramadan dan Idul Fitri 2018. Pada periode tersebut, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawan akan dilakukan. Di sisi lain, pemerintah akan mengeluarkan anggaran untuk gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, hal itu mendorong pertumbuhan konsumsi. Pemerintah akan mengoptimalkan belanja dari APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap di jalur positif di triwulan II 2018. Pemerintah akan menjaga APBN 2018 menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga kredibilitas dan sustainibilitas. Defisit APBN tetap dijaga pada kisaran 2,19 persen dari PDB atau lebih kecil sesuai UU APBN untuk mendorong pencapaian pendapatan Negara, memperbaiki kualitas belanja, serta pengelolaan utang secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan dari sisi penerimaan, realisasi Penerimaan Negara sampai dengan triwulan I 2018 baru mencapai 81,03 persen dibandingkan realisasi pada periode

yang sama tahun 2017. Hal-hal yang mempengaruhi belum tercapainya target Penerimaan Negara antara lain masih belum optimalnya belanja infrastruktur



pemerintah di awal tahun. Mengacu pada tren Realisasi Penerimaan Negara tahun 2016 dan 2017, maka realisasi penerimaan Negara lingkup Provinsi NTB triwulan II 2018 diperkirakan akan mencapai Rp906,39 miliar. Berdasarkan prognosis tersebut, maka realisasi Penerimaan Negara sampai dengan

triwulan II 2018 diperkirakan sebesar Rp1,62 triliun.

**Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi NTB s.d Triwulan II 2018**

(Sumber: OMSPAN, diolah)

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d Triwulan II	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Negara	3.467.461,86	714.325,73	10,60	1.620.724	46,74
Belanja Negara	8.022.564,82	884.687,29	11,02	2.564.071,09	31,96
Surplus/Defisit	(4.555.102,96)			(943.347,09)	

Sementara itu, Realisasi Belanja Negara triwulan II 2018 diperkirakan sebesar Rp2,56 triliun yang dihitung berdasarkan tren Belanja Negara 2018. Dalam pola realisasi belanja tahun

sebelumnya, terdapat alokasi anggaran yang tidak terserap terutama berasal dari sisa lelang dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pembayaran THR ASN/TNI/POLRI yang diperkirakan dibayarkan pada bulan Juni 2018 akan mendongkrak realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Pusat. Perkiraan Realisasi Belanja Negara triwulan II 2018 tidak memperhitungkan perkiraan realisasi Belanja DAK Fisik dan Dana Desa, karena diasumsikan dapat terealisasi dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan sampai dengan triwulan I 2018. Berdasarkan prognosis tersebut, maka realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir 2018 diperkirakan sebesar Rp7,38 triliun.

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu instrumen yang digunakan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah juga berperan sebagai pendorong dan penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masyarakat.

**Tabel III.1 Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2017 dan 2018**  
(dalam miliar Rp)

URAIAN	2018			2017		
	PAGU	REALISASI	PERSEN	PAGU	REALISASI	PERSEN
<b>A. PENDAPATAN</b>	<b>20,457.49</b>	<b>4,143.29</b>	<b>20.25%</b>	<b>17,622</b>	<b>4,088</b>	<b>23.20%</b>
PAD	3,567.17	482.48	13.53%	2,909	452	15.55%
Dana Transfer	15,938.74	3,586.13	22.50%	14,352	3,593	25.04%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	951.58	74.68	7.85%	361	43	11.81%
<b>B. BELANJA</b>	<b>20,993.05</b>	<b>2,258.23</b>	<b>10.76%</b>	<b>18,025</b>	<b>1,807</b>	<b>10.02%</b>
Belanja Operasional	16,624.32	2,025.85	12.19%	13,407	1,595	11.90%
Belanja Modal	4,004.63	195.59	4.88%	3,732	65	1.75%
Belanja Tak Terduga	36.23	2.46	6.79%	42	1	3.09%
Belanja Transfer	327.87	34.34	10.47%	845	145	17.11%
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>545.05</b>	<b>540.57</b>	<b>99.18%</b>	<b>404</b>	<b>330</b>	<b>81.78%</b>
Penerimaan Pembiayaan	645.39	548.47	84.98%	550	353	64.21%
Pengeluaran Pembiayaan	100.34	7.90	7.87%	146	23	15.70%
<b>SURPLUS TRIWULAN I</b>	<b>(535.56)</b>	<b>1,885.06</b>		<b>(403)</b>	<b>2,281</b>	

Sumber: LRA APBD (diolah)

Realisasi belanja APBD seluruh Kabupaten/Kota/Provinsi sampai dengan triwulan I 2018 di Provinsi NTB sebesar Rp2,26 triliun atau 10,76 persen dari total pagu sebesar Rp20,99 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 terdapat sedikit peningkatan dimana realisasi belanja sebesar 0,74 persen yang semula Rp1,81 triliun atau 10,02 persen dari total pagu sebesar Rp18,03 triliun. Namun, realisasi belanja modal masih sangat rendah, hanya sebesar 4,88 persen dari pagu sebesar Rp4 triliun atau 14,23 dari keseluruhan belanja.

#### A. Pendapatan Daerah

Sampai dengan triwulan I 2018 Pendapatan Pemerintah Daerah di Provinsi NTB sebesar Rp4,14 triliun atau 20,25 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 23,20 persen. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Pemda se Provinsi NTB triwulan I 2018 sebesar Rp482,48 miliar atau 13,53 persen. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan minus 5,74 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2017.



## a) Penerimaan Pajak Daerah

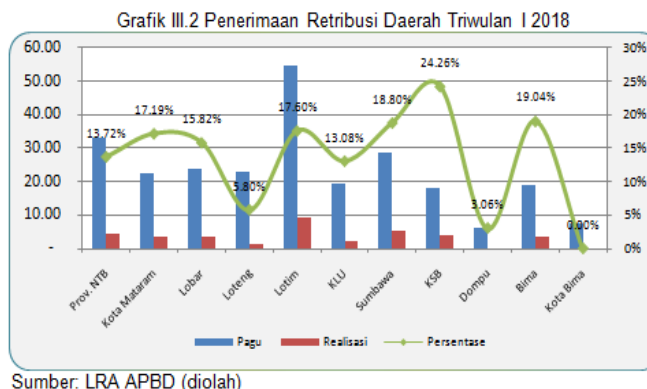


Penerimaan pajak daerah secara agregat sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp347,49 miliar atau 18,61 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian penerimaan pajak daerah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,17

persen dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2017.

Provinsi NTB memberikan kontribusi terbesar capaian Pajak Daerah sebesar Rp225,01 miliar atau 64,75 dari agregat penerimaan Pajak Daerah se-Provinsi NTB. Berdasarkan tingkat persentase capaian, Kota Bima belum berhasil merealisasikan penerimaan Pajak Daerah dari target sebesar Rp14,85 miliar.

## b) Penerimaan Retribusi Daerah



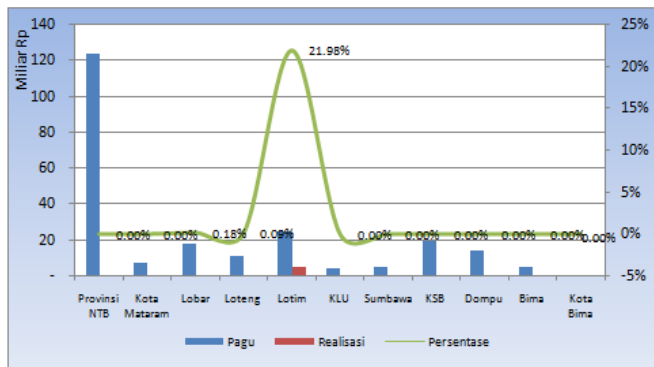
Penerimaan Retribusi Daerah secara agregat di Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp39,19 miliar atau 15,34 persen dari target. Capaian tersebut meningkat dibandingkan

periode yang sama Tahun 2017 sebesar 26 persen. Kabupaten Lombok Timur mampu memberikan kontribusi terbesar yang mencapai Rp9,60 miliar, sedangkan Kota Bima belum merealisasikan penerimaan retribusi daerah. Sedangkan, persentase tertinggi penerimaan retribusi daerah oleh Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 24,26 persen dari target yang telah ditetapkan.

## c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara agregat di Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp5,57 miliar atau 2,35 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 2,45 persen.

Grafik III.3 Penerimaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Triwulan I 2018



Sumber: LRA APBD (diolah)

Kabupaten Lombok Timur memberikan kontribusi terbesar mencapai Rp5,52 miliar, kemudian Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp0,03 miliar, dan Kabupaten Lombok Tengah merealisasikan sebesar Rp0,01 miliar dari target

yang telah ditetapkan. Sedangkan Kabupaten/ Kota yang lainnya belum merealisasinya.

## 2. Pendapatan Transfer

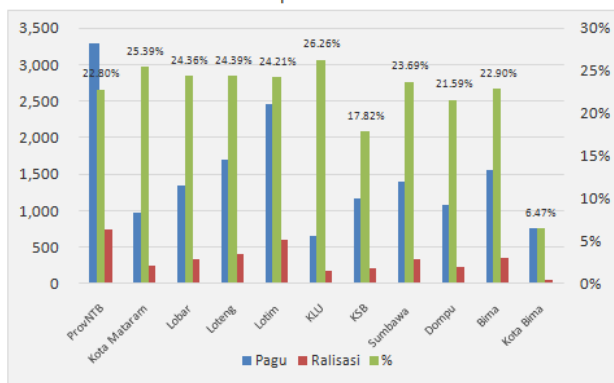
Tabel III.2 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Ke Daerah

PENDAPATAN TRANSFER	2018			2017		
	Pagu	Realisasi	Persen	Pagu	Realisasi	Persen
Transfer Pem.Pusat Dana Perimbangan	14,673.80	3,317.92	22.61%	12,460.42	3,389.68	27.20%
Bagi Hasil Pajak	692.26	130.71	18.88%	642.91	158.13	24.60%
Bagi Hasil Bukan Pajak	608.90	77.07	12.66%	509.28	231.01	45.36%
Dana Alokasi Umum	8,564.17	2,739.04	31.98%	8,350.26	2,540.03	30.42%
Dana Alokasi Khusus	4,391.66	279.52	6.36%	2,775.57	433.38	15.61%
Dana Alokasi Non Fisik	-	-	0.00%	182.40	27.12	14.87%
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	416.82	91.59	21.97%	1,373.57	90.31	6.57%
Transfer Pemerintah Provinsi	724.80	170.49	23.52%	470.30	113.14	24.06%
Bantuan Keuangan	540.13	97.73	18.09%	361.32	42.69	11.81%
<b>Total</b>	<b>16,355.56</b>	<b>3,677.72</b>	<b>22.49%</b>	<b>14,665.60</b>	<b>3,635.81</b>	<b>24.79%</b>

Sumber: LRA APBD (diolah)

Realisasi Pendapatan Transfer secara agregat di Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp3,68 atau 22,49 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 24,49 persen.

Grafik III. 4 Pendapatan Transfer Triwulan I 2018

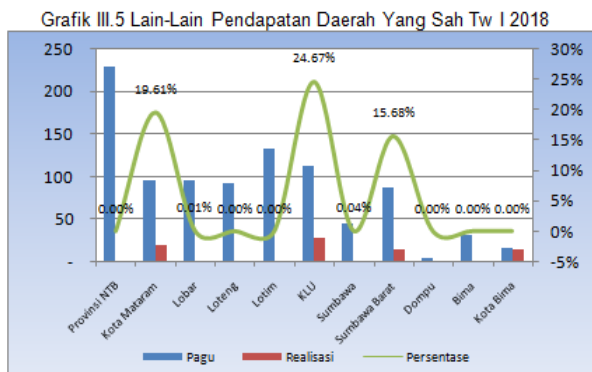


Sumber: LRA APBD (diolah)

Berdasarkan grafik di samping, rata-rata realisasi Dana Transfer di atas 22 persen, kecuali Kota Bima yang baru mencapai 6,47 persen.

Hal ini disebabkan realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak yang belum terealisasi atau sebesar 0 persen.

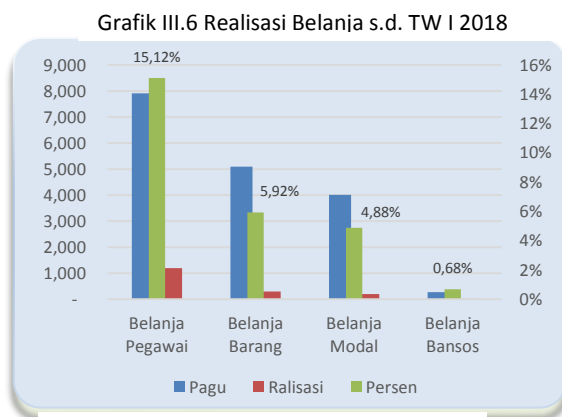
### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah



Sumber: LRA APBD (diolah)

di samping, kontribusi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tertinggi oleh Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp25,60 miliar dan belum merealisasikan Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

### B. Belanja Daerah



Sumber: LRA APBD (diolah)

sebesar Rp2,03 triliun terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,19 triliun atau sebesar 59,06 persen dari belanja operasional, belanja barang Rp0,30 triliun atau sebesar 14,89 persen dari belanja operasional, belanja hibah sebesar Rp0,32 triliun atau sebesar 15,68 persen dari belanja operasional dan belanja bantuan keuangan Rp0,21 triliun atau sebesar 10,28 persen dari belanja operasional.

### C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari kondisi perekonomian nasional, Sejalan dengan prognosis realisasi pendapatan dan belanja APBN, dalam memperkirakan realisasi APBD juga menggunakan asumsi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Indonesia.

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi NTB akan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp74,68 miliar atau 7,85 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 11,81 persen. Berdasarkan Grafik di

Realisasi Belanja Daerah di lingkup Provinsi NTB sampai dengan triwulan I 2018 adalah sebesar Rp1,69 triliun atau 9,81 persen dari total alokasi pagu Belanja sebesar Rp17,30 triliun. Capaian tersebut 0,38 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 9,49 persen. Kontribusi belanja operasi

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja daerah difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang dapat menukik langsung pencapaian indikator kinerja daerah yang telah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel III.3 Prognosis Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2018**

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d Triwulan II	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	20.874,31	4.234,88	20,29	10.526,91	50,43
Belanja Daerah	20.993,05	2.258,23	10,76	7.104,05	33,84
Surplus/Defisit	(118,74)	1.976,65		3.422,86	

Sumber: LRA APBD Kab/Kota/Provinsi di NTB (diolah)

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan I 2018 mencapai 20,29 persen. Pemerintah Provinsi NTB terus bekerja keras mengejar target dari sektor PAD. Obyek pajak daerah yang berpotensi memberikan kontribusi yang cukup tinggi adalah pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak reklame, dan pajak penerang jalan serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan memperhatikan tren pada triwulan II 2017, dimana penerimaan pendapatan daerah mencapai 50,43 persen dari target, maka realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II 2018 diperkirakan akan mencapai Rp10,53 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan I 2018 mencapai 10,76 persen. Optimisme penyerapan belanja selama triwulan II dan memperhatikan tren belanja tahun 2017 yang mencapai 33,84 persen, maka sampai dengan triwulan II 2018, realisasi belanja daerah diperkirakan mencapai Rp7,10 triliun.

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi NTB s.d.Triwulan I Tahun 2018

Dalam Miliar Rupiah

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	4.371,51	4.146,47	4.860,79	3,12%	4.713,83
Pendapatan Perpajakan	588,80	347,35	936,15	-7,29%	1.009,76
Pendapatan Bukan Pajak	3.782,71	3.799,12	3.924,65	5,95%	3.704,07
Hibah	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-
Belanja Negara	4.541,90	2.124,98	3.009,69	11,95%	2.688,53
Belanja Pemerintah	884,71	2.015,58	2.900,29	13,19%	2.562,36
Transfer	3.657,18	109,40	109,40	-13,30%	126,18
Surplus/(Defisit)	-170,39	2.021,49	1.851,10	-8,60%	2.025,29
Pembiayaan	-	540,57	540,57	63,73%	330,17
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	548,47	548,47	55,32%	353,13
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	7,90	7,90	-65,59%	22,96
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-170,39	2.562,06	2.391,67	1,54%	2.355,46

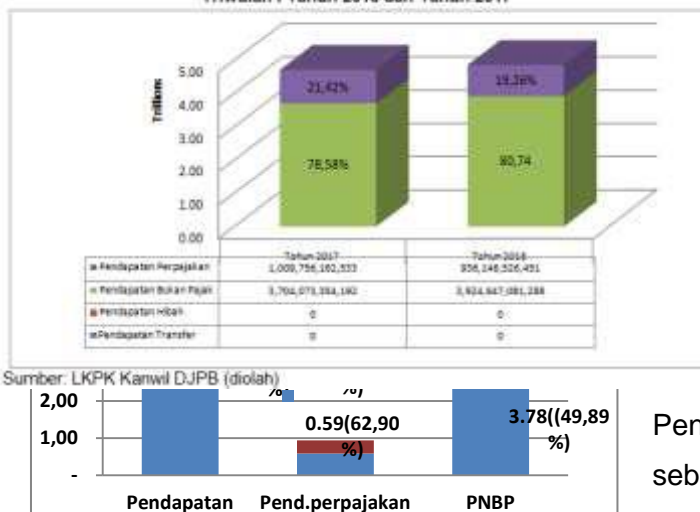
Catatan:

\*) Pendapatan Dropping Dana Transfer merupakan Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat

##### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

###### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi NTB s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017



Realisasi Pendapatan Konsolidasian pada triwulan I 2018 sebesar Rp4,86 triliun, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 3,12 persen jika dibandingkan dengan pendapatan konsolidasian triwulan I 2017. Realisasi

Pendapatan Konsolidasian sebagian besar berasal dari Pendapatan Bukan Pajak (80,74

persen) sebesar Rp3,92 triliun, Pendapatan Pajak sebesar 19,26 persen (Rp0,93 triliun) dan Pendapatan Hibah dan pendapatan transfer ditahun 2018 ini menjadi komponen atau termasuk item Pendapatan Bukan Pajak sehingga bernilai Rp0. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah belum memberikan

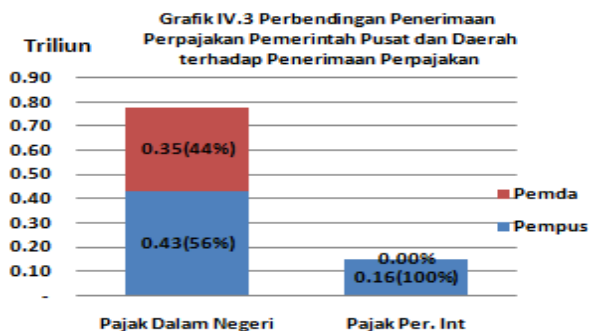
kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian karena telah dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer, Namun di tahun 2018 terdapat realisasi termasuk sebesar Rp109,40 miliar, karena terdapat transfer Antara Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam kategori yang dieliminasi.

Berdasarkan grafik di samping, Pendapatan Pemerintah Pusat menyumbang lebih besar (51,32 persen) atau sebesar Rp4,37 triliun terhadap pendapatan konsolidasian, sedangkan sisanya 48,68 persen (Rp4,15 triliun) disumbangkan oleh pendapatan pemerintah daerah.

Dari total Pendapatan Perpajakan, penerimaan Pemerintah Pusat menyumbang sebesar Rp0,59 triliun atau 62,90 persen, sementara sisanya merupakan Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp0,35 triliun atau 37,10 persen.

Sementara itu, komposisi dari Pendapatan PNBPN ada perimbangan pendapatan namun Pemerintah Daerah sedikit lebih tinggi sebesar 50,11 persen (Rp3,80 triliun), sedangkan sisanya sebesar 49,89 persen (Rp3,78 triliun) diperoleh dari penerimaan Pemerintah Pusat. Perimbangan Pendapatan PNBPN ini disebabkan adanya Pendapatan Dropping Dana Transfer sebesar Rp3,66 triliun yang menjadi Pendapatan PNBPN Pemerintah Pusat.

## 2. Analisis Perubahan



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. NTB

Pemerintah Daerah sebesar Rp0,35 triliun atau 44 persen.

Sementara itu, seluruh Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp0,16 triliun disumbangkan oleh Pemerintah Pusat, karena Pajak Perdagangan Internasional menjadi penerimaan Pajak Pusat atau yang dikelola Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki pendapatan pajak jenis ini.

## 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian triwulan I 2018 sebesar Rp0,59 triliun terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pemerintah Pusat sebesar Rp0,43 triliun atau 56 persen, lebih besar dibanding Pendapatan Pajak Dalam Negeri



Sampai dengan triwulan I 2018, realisasi PDRB Provinsi NTB sebesar Rp29,70 triliun atau dengan pertumbuhan sebesar 6,00 persen dibanding tahun 2017

Tabel.IV.2 realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	1.009.756.162.533	4,28%	936.146.526.451	-7,29%
PNBP	3.704.073.354.192	-9,61%	3.924.647.081.288	5,95%
Total	4.713.829.516.725	-6,95%	4.860.793.607.739	3,12%
PDRB/Pert. Ekonomi (Triliun)	28,02	1,19%	29,70	6,00%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. NTB (diolah)

periode yang sama (*y on y*) dan jika dibandingkan dengan triwulan I 2017 (*q to q*) tumbuh 1,19 persen. Sementara itu, pada periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan

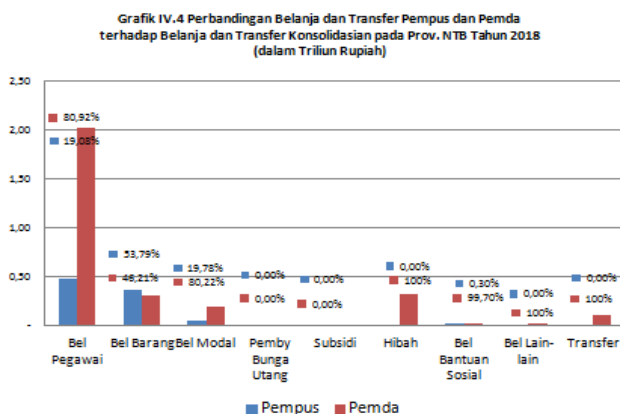
pemerintah pusat adalah sebesar Rp4,86 triliun atau naik sebesar 3,12 persen. Adanya selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut mengindikasikan masih terdapat potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang belum dioptimalkan khususnya oleh pemerintah daerah. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi NTB berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas:

#### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian triwulan I 2018 sebesar Rp3,84 triliun yang terdiri dari



konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp0,88 triliun atau 23,04 persen dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp2,96 triliun atau 76,96 persen dimana Belanja transfer Pemerintah Pusat dieliminasi sebesar Rp3,65 triliun.

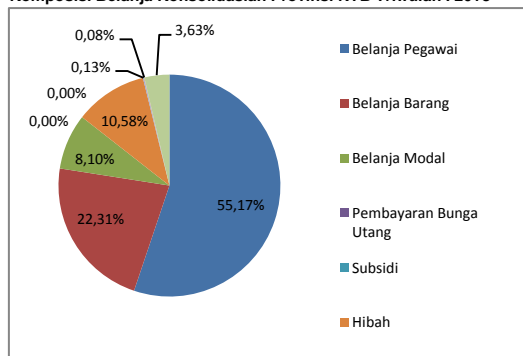
Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa Belanja Pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp0,48 triliun atau 19,08 persen lebih kecil dibanding Belanja Pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp2,02 triliun. Belanja Barang Pemerintah Pusat sebesar Rp0,36 triliun atau 53,79 persen lebih besar dibanding Belanja barang Pemerintah Daerah sebesar Rp0,31 triliun. Belanja Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp0,05 triliun atau 19,78 persen lebih kecil dibanding Belanja Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp0,20 triliun.



Belanja Pembayaran Bunga Utang dan Belanja Hibah Pemerintah Pusat nihil begitu juga Pemerintah Daerah.

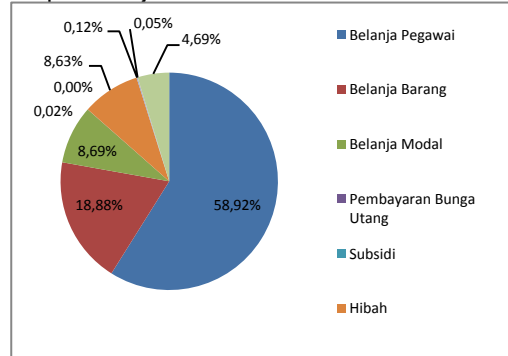
## 2. Analisis Perubahan

Grafik IV.5  
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi NTB Triwulan I 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

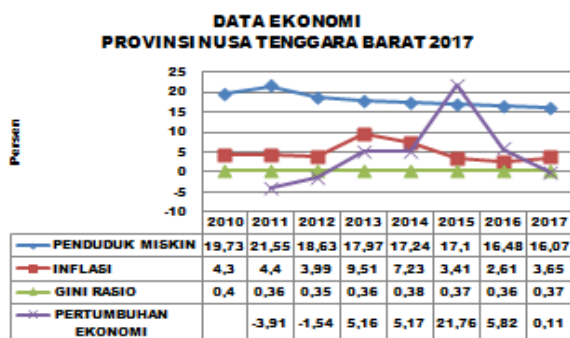
Grafik IV.6  
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi NTB Triwulan I 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi Belanja Konsolidasian triwulan I 2018 sebesar Rp3,01 triliun mengalami kenaikan Rp0,32 triliun atau 11,90 persen jika dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian triwulan I 2017 yaitu sebesar Rp2,69 triliun. Realisasi Belanja Konsolidasian terdiri dari konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp0,89 triliun dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp2,12 triliun. Belanja Pegawai Konsolidasian triwulan I 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp76,24 miliar atau 4,81 persen dibandingkan dengan Belanja Pegawai Konsolidasian triwulan I 2017. Belanja Barang Konsolidasian triwulan I 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp163,68 miliar dibandingkan dengan triwulan I 2017. Belanja Modal Konsolidasian triwulan I 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10,27 miliar dibandingkan dengan triwulan I 2017.

## 3. Analisis Dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional



Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB dari 2010 sampai dengan 2017 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB yang semakin baik, sebagai dampak

dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. **Inflasi** dari 2010 sampai 2017 masih berada dalam hitungan satu digit walaupun sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada 2013 dan 2014

cukup tinggi. Pada triwulan I 2018 laju inflasi “tahun ke tahun” Maret 2018 sebesar 3,30 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Maret 2017 sebesar 4,33 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan deflasi pada Kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan.

**Gini Rasio** atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010 sampai dengan 2017 masih berada dalam tingkat ketimpangan rendah berarti bahwa pemerataan pendapatan atau kekayaan masih dalam kendali (baik). **Laju Pertumbuhan Ekonomi** dari tahun 2013 hingga 2017 secara rata-rata berada di atas 5 persen, Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2017 terhadap 2016, maka pertumbuhan ekonomi NTB hanya tumbuh sebesar 0,11 persen. Rendahnya pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada kegiatan pertambangan bijih logam dibanding 2016, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti. *“Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan I-2018 dibanding periode yang sama tahun 2017 (y on y) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,33 persen, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,29 persen. Hal ini juga tergambar dari sisi PDRB Pengeluaran dimana Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi paling tinggi yaitu 22,46 persen (BPS NTB, BRS tanggal 07-05-2018)”*

#### **D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

Ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi NTB triwulan I 2018 di bawah ini menunjukkan bahwa Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional di wilayah Provinsi NTB dalam posisi plus Rp1,81 triliun dari keseluruhan kebutuhan operasi keuangan sebesar Rp2,96 triliun, namun jika Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional di wilayah Provinsi NTB ini dikurangi Pendapatan *Dropping* Dana Transfer sebesar Rp3,67 triliun ke Pemerintah Daerah maka posisi menjadi minus sebesar Rp1,86 triliun, Posisi ini mengindikasikan masih besarnya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTB terhadap Keuangan Pemerintah Pusat. Kemampuan operasi keuangan pemerintah di Provinsi NTB baru berada pada angka 37,16 persen. Indikasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi Pemerintah (Komponen G) dalam pembentukan PDRB

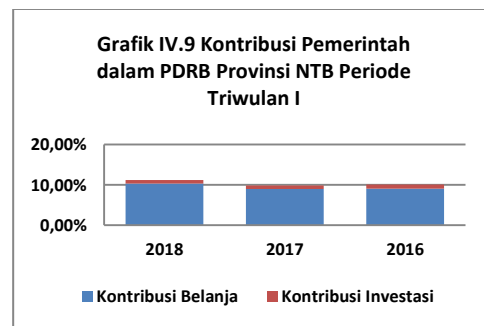
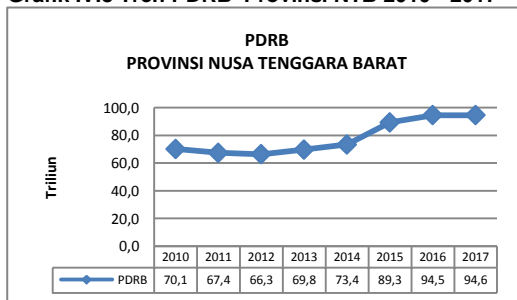
masih sangat tinggi. Dengan demikian, tingkat sensitifitas pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi NTB terhadap kontribusi belanja Pemerintah sangat tinggi.

Table IV.3  
Ringkasan LO Tingkat WJ, Prov. NTB

URAIAN	dalam Miliar Rupiah				
	P. Pusat	P. Daerah	Eliminasi (Debit)	Eliminasi (Kredit)	Konsolidasian
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN	688,89	335,27	-	-	924,17
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	3.794,42	114,31	64,22	-	3.844,51
PENDAPATAN TRANSFER	-	3.550,95	3.550,95	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	29,83	29,83	-	-
PENDAPATAN PENYESUAIAN	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	4.383,31	4.030,37	3.645,00	-	4.768,88
BEBAN OPERASIONAL	4.521,38	2.073,05	-	3.645,00	2.909,43
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(148,07)	1.957,32	3.645,00	(3.645,00)	1.009,25
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-	-
BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,004	-	-	-	0,004
BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,004	-	-	-	0,004
POS LUAR BIASA					
Pendapatan luar biasa	-	-	-	-	-
Beban luar biasa	-	2,957	-	-	2,957
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	-	(2,957)	-	-	(2,957)
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(148,00)	1.954,36	3.645,00	(3.645,00)	1.006,30

Pada Grafik di bawah ini, tren PDRB menunjukkan penurunan pada 2011 dan 2012, kemudian mulai 2013 terjadi peningkatan hingga Tahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan membaiknya pendapatan masyarakat sehingga daya beli (konsumsi) masyarakat naik dan seluruh lapangan usaha dapat berkembang.

Grafik IV.8 Tren PDRB Provinsi NTB 2010 - 2017



Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Tahun 2018 triwulan I kontribusi pemerintah terhadap PDRB masih terlihat lebih tinggi jika dibanding tahun-tahun sebelumnya hal ini salah satunya disebabkan karena pagu APBN Provinsi NTB tahun 2018 memang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,33 persen.

## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### A. PARIWISATA NTB YANG TERUS MENDUNIA

Selasa 20 Maret 2018 11:56 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Lombok, kini menjadi buah bibir para pelancong dunia dalam beberapa tahun terakhir. Lombok menawarkan sejumlah destinasi wisata yang tidak kalah menariknya dari tetangga sebelah, Bali.

Pelbagai destinasi menarik tersedia di Pulau Seribu Masjid. Mulai dari keindahan bawah laut, gugusan perbukitan yang hijau, bentangan pasir putih di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, eksotisme tiga gili di Lombok Utara, hingga panorama Gunung Rinjani.

Tak hanya itu, Lombok juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi buruan para pelancong dunia, termasuk sajian kuliner berselera pedas. Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal mengatakan pengembangan sektor pariwisata tak dilakukan dalam sekejap.

Program pengembangan pariwisata, kata Faozal, mulai digagas saat Tuan Guru Haji TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menjabat sebagai Gubernur NTB pada 2008 lalu. Faozal menambahkan, berbagai upaya ditempuh dalam memajukan sektor pariwisata, mulai dari regulasi, promosi, hingga penguatan destinasi.

Hasilnya, tingkat kunjungan wisatawan ke NTB terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Catatan, Dinas Pariwisata NTB, jumlah kunjungan pada 2008 hanya sebanyak 500 ribu. Namun, pada 2017 kemarin, jumlah ini membengkak hingga 3,5 juta wisatawan.

"Potret pariwisata NTB kita lihat saat ini pada 2017 sudah menyentuh 3,5 juta wisatawan, dan tahun depan ditargetkan empat juta wisatawan," ujar Faozal di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Selasa (20/3).

Faozal mengungkapkan, kemajuan sektor pariwisata pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, pelaku industri wisata, pelaku ekonomi kreatif. Efek dari berbagai aktivitas pariwisata berdampak pada masyarakat.

"Bagi pelaku industri wisata dengan hadirnya industri kreatif memberikan kesejahteraan masyarakat," kata Faozal menambahkan.

**B. MENKEU MINTA MANDALIKA BERSIAP SAMBUT ANNUAL MEETING IMF**

Kamis 01 Maret 2018 15:28 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Gita Amanda

**Sri berharap annual meeting IMF dapat memberi dampak bagi wilayah sekitar Bali.**

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendatangi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sri menyampaikan, kedatangannya ini untuk melihat persiapan KEK Mandalika dalam menyambut para peserta *Annual Meeting IMF-World Bank* yang diselenggarakan di Bali.

Sri Mulyani berharap, penyelenggaraan *Annual Meeting IMF-World Bank* 2018 di Bali bisa memberikan dampak bagi wilayah lain. Terutama Lombok yang berada di sebelah Bali dan juga memiliki aneka destinasi yang tidak kalah indahnya.

"*Annual meeting* diharapkan bisa mendapatkan manfaat bagi daerah-daerah lain, terutama ini Mandalika yang paling dekat dengan Bali," ujar Sri Mulyani saat meninjau KEK Mandalika, Kamis (1/3).

Menurut Sri, Mandalika merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sri menilai, penyelenggaraan *Annual Meeting IMF-World Bank* 2018 bisa meningkatkan promosi wisata KEK Mandalika.

Sri meminta, pengelola KEK Mandalika, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mempersiapkan sebaik mungkin terutama menyangkut infrastruktur jalan. Agar memberi kemudahan akses bagi para pengunjung.

"Kita berharap bisa membuat banyak sekali pengunjung atau peserta *Annual Meeting* untuk merencanakan apakah mereka akan tinggal lebih lama, setelah atau sebelum," kata Sri menambahkan.



Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Jl. Majapahit Nomor 10 Mataram Telp (0370) 643611, 621570  
Email : ppa2ntb@gmail.com

***BERSAMA ANDA MEMBANGUN EKONOMI DAN MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT***